

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji upaya gender mainstreaming yang dilakukan oleh International Olympic Committee (IOC) dalam mengatasi diskriminasi gender melalui implementasi Olympic Agenda 2020+5 pada penyelenggaraan *Summer Olympics* dan *Winter Olympics* periode 2021–2025. Penelitian dianalisis menggunakan perspektif Feminist Institutionalism, yang memandang bahwa kesetaraan gender tidak hanya bergantung pada peningkatan partisipasi perempuan, tetapi juga memerlukan perubahan terhadap institusi formal, institusi informal, relasi kekuasaan, serta norma-norma yang membentuk tata kelola organisasi. Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah penelitian.

Pertama, penelitian ini menyimpulkan bahwa IOC menerapkan gender mainstreaming melalui dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu integrated gender mainstreaming dan targeted gender mainstreaming. Pendekatan integrated gender mainstreaming diwujudkan melalui reformasi kelembagaan yang mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses tata kelola Gerakan Olimpiade. Reformasi tersebut dilakukan melalui *Olympic Charter*, *Olympic Agenda 2020*, *Olympic Agenda 2020+5*, *IOC Gender Equality Review Project*, serta *Gender Equality and Inclusion Framework 2021–2024* yang memuat 21 *Gender Equality and Inclusion Objectives* pada lima area utama, yaitu partisipasi, kepemimpinan, safe sport, representasi media, dan alokasi sumber daya. Reformasi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan konkret, seperti penyesuaian kuota atlet, penambahan nomor pertandingan perempuan, penyelenggaraan mixed-gender events, penerapan kebijakan

Bayu Ramadhani, 2026

UPAYA GENDER MAINSTREAMING OLEH INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE (IOC) DALAM MENGATASI DISKRIMINASI GENDER MELALUI KEBIJAKAN OLYMPIC AGENDA 2020+5: STUDI KASUS WINTER & SUMMER OLYMPICS PERIODE 2021-2025

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dual flag bearer, penyusunan *Portrayal Guidelines*, serta mekanisme evaluasi berbasis gender. Seluruh kebijakan tersebut menunjukkan bahwa IOC tidak lagi menempatkan kesetaraan gender sebagai program yang bersifat sektoral, melainkan sebagai prinsip yang diintegrasikan ke dalam penyelenggaraan Olimpiade maupun tata kelola organisasi secara menyeluruh.

Di sisi lain, pendekatan targeted gender mainstreaming diterapkan melalui berbagai program yang secara khusus ditujukan untuk meningkatkan posisi dan partisipasi perempuan dalam olahraga. Upaya tersebut diwujudkan melalui penetapan target 50% partisipasi atlet perempuan, penguatan *Women in Sport Commission*, pengembangan program *Women in Sport High Performance Pathway (WISH)* bagi pelatih perempuan, peningkatan kepemimpinan perempuan dalam organisasi olahraga, serta penyusunan pedoman representasi media yang lebih setara (Stone, 2025). Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa IOC tidak hanya berupaya mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan umum, tetapi juga memberikan intervensi yang secara langsung ditujukan untuk mengurangi kesenjangan yang dialami perempuan dalam ekosistem olahraga internasional.

Kedua, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi gender mainstreaming oleh IOC menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap tata kelola olahraga internasional. Pencapaian keseimbangan gender 50:50 pada Olimpiade Paris 2024 menjadi indikator paling nyata keberhasilan kebijakan tersebut. Selain meningkatnya partisipasi atlet perempuan, reformasi juga tercermin pada bertambahnya jumlah nomor pertandingan perempuan, meningkatnya jumlah mixed-gender events, semakin besarnya representasi perempuan dalam struktur kepemimpinan IOC, serta meningkatnya perhatian terhadap representasi perempuan dalam media olahraga. Capaian tersebut menunjukkan bahwa IOC berhasil membangun standar baru mengenai kesetaraan gender yang kemudian diadopsi oleh Federasi Olahraga Internasional (International

Bayu Ramadhani, 2026

UPAYA GENDER MAINSTREAMING OLEH INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE (IOC) DALAM MENGATASI DISKRIMINASI GENDER MELALUI KEBIJAKAN OLYMPIC AGENDA 2020+5: STUDI KASUS WINTER & SUMMER OLYMPICS PERIODE 2021-2025

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Federations/IFs), Komite Olimpiade Nasional (National Olympic Committees/NOCs), serta berbagai pemangku kepentingan dalam Gerakan Olimpiade. Dengan demikian, IOC tidak hanya berperan sebagai penyelenggara Olimpiade, tetapi juga sebagai norm entrepreneur yang membentuk norma global mengenai kesetaraan gender dalam olahraga.

Ketiga, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa keberhasilan reformasi formal tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan pada tingkat norma sosial dan budaya. Berbagai kasus yang terjadi selama periode penelitian, seperti pernyataan seksis mantan Presiden Komite Penyelenggara Olimpiade Tokyo 2021, Mori Yoshirō, kontroversi mengenai partisipasi atlet transgender, larangan penggunaan hijab bagi atlet perempuan yang mewakili Prancis pada Olimpiade Paris 2024, serta masih ditemukannya stereotip gender dalam pemberitaan media menunjukkan bahwa diskriminasi gender dalam olahraga tidak hanya berasal dari kelemahan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya patriarki, nilai-nilai sosial, serta struktur organisasi yang telah lama didominasi oleh laki-laki. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perubahan terhadap institusi formal belum secara otomatis mengubah institusi informal yang masih mempertahankan relasi kekuasaan yang tidak setara.

Konsep norm entrepreneur yang digunakan dalam pembahasan pada penelitian ini tidak digunakan sebagai teori utama, melainkan sebagai konsep yang menjelaskan peran IOC sebagai aktor pembentuk dan penyebar norma kesetaraan gender melalui Olympic Agenda 2020+5. Efektivitas penyebaran norma tersebut kemudian dianalisis menggunakan perspektif Feminist Institutionalism yang berfokus pada perubahan institusi formal dan informal dalam mewujudkan kesetaraan gender. Kedua pendekatan tersebut digunakan secara komplementer, di mana norm entrepreneur menjelaskan proses difusi norma, sedangkan Feminist Institutionalism menjelaskan bagaimana norma tersebut

Bayu Ramadhani, 2026

UPAYA GENDER MAINSTREAMING OLEH INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE (IOC) DALAM MENGATASI DISKRIMINASI GENDER MELALUI KEBIJAKAN OLYMPIC AGENDA 2020+5: STUDI KASUS WINTER & SUMMER OLYMPICS PERIODE 2021-2025

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

diinstitusionalisasikan serta sejauh mana mampu mentransformasikan institusi yang sebelumnya bersifat lebih patriarkal menjadi lebih inklusif.

Berdasarkan perspektif Feminist Institutionalism, penelitian ini menyimpulkan bahwa IOC telah berhasil melakukan *institutional change* melalui reformasi berbagai institusi formal yang mengatur tata kelola olahraga internasional. Perubahan tersebut terlihat melalui revisi berbagai kebijakan, pembentukan kerangka kesetaraan gender, penguatan mekanisme evaluasi, serta perubahan regulasi kompetisi yang lebih inklusif. Namun demikian, keberadaan gendered institutions, path dependency, serta gendered power relations masih menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan tersebut. Dominasi laki-laki dalam kepemimpinan olahraga di berbagai negara, stereotip mengenai perempuan dalam olahraga, serta perbedaan konteks politik dan budaya masing-masing negara menunjukkan bahwa proses gender mainstreaming merupakan proses perubahan institusional yang berlangsung secara bertahap dan memerlukan komitmen jangka panjang.

Implementasi Olympic Agenda 2020+5 pada periode penelitian tidak berlangsung secara instan, melainkan menunjukkan perkembangan yang bertahap pada setiap penyelenggaraan Olimpiade. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini tidak hanya melihat keberhasilan atau kegagalan kebijakan IOC secara terpisah, tetapi juga menelaah bagaimana perubahan tersebut berkembang sepanjang periode 2021–2025. Tokyo 2021 menjadi fase awal implementasi Olympic Agenda 2020+5 setelah kerangka kebijakan tersebut diluncurkan pada tahun 2021. Pada tahap ini, IOC mulai menerapkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesetaraan gender, seperti peningkatan jumlah nomor pertandingan campuran (*mixed events*), penerapan kebijakan *dual flag bearer*, serta peningkatan partisipasi atlet perempuan hingga mendekati target paritas. Namun demikian, berbagai bentuk diskriminasi, seperti komentar seksis dari Ketua Panitia Penyelenggara Tokyo 2021 dan rendahnya representasi perempuan dalam posisi kepelatihan, menunjukkan bahwa perubahan

Bayu Ramadhani, 2026

UPAYA GENDER MAINSTREAMING OLEH INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE (IOC) DALAM MENGATASI DISKRIMINASI GENDER MELALUI KEBIJAKAN OLYMPIC AGENDA 2020+5: STUDI KASUS WINTER & SUMMER OLYMPICS PERIODE 2021-2025

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kelembagaan belum sepenuhnya menghilangkan praktik diskriminatif dalam penyelenggaraan Olimpiade.

Memasuki Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022, implementasi Olympic Agenda 2020+5 menunjukkan perkembangan lebih lanjut, terutama melalui peningkatan representasi perempuan dalam berbagai aspek penyelenggaraan Olimpiade. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa kesenjangan struktural masih bertahan, khususnya pada cabang olahraga musim dingin seperti *Nordic Combined* yang hingga periode penelitian masih belum membuka nomor pertandingan bagi atlet perempuan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penerapan prinsip kesetaraan gender belum berlangsung secara merata pada seluruh cabang olahraga di bawah Gerakan Olimpiade. Dengan demikian, fase Beijing 2022 memperlihatkan adanya kemajuan dalam indikator kuantitatif, tetapi masih menyisakan hambatan pada aspek regulasi dan budaya kelembagaan.

Pergeseran yang paling signifikan terlihat pada Olimpiade Paris 2024. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Olimpiade modern, IOC berhasil mencapai komposisi atlet perempuan dan laki-laki yang seimbang, yaitu 50:50, sehingga target utama Olympic Agenda 2020+5 dalam aspek partisipasi atlet dapat dikatakan tercapai. Namun demikian, capaian tersebut tidak secara otomatis mencerminkan terwujudnya kesetaraan gender secara substantif. Kontroversi mengenai larangan penggunaan hijab bagi atlet perempuan Prancis serta polemik yang menimpa petinju Aljazair, Imane Khelif, menunjukkan bahwa diskriminasi gender masih muncul dalam bentuk yang lebih kompleks, yaitu berkaitan dengan identitas, representasi, dan penerapan regulasi. Oleh karena itu, meskipun IOC berhasil mendorong perubahan kelembagaan yang signifikan selama periode 2021–2025, implementasi gender mainstreaming masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang menyebabkan tujuan Olympic Agenda 2020+5 belum sepenuhnya tercapai.

Bayu Ramadhani, 2026

UPAYA GENDER MAINSTREAMING OLEH INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE (IOC) DALAM MENGATASI DISKRIMINASI GENDER MELALUI KEBIJAKAN OLYMPIC AGENDA 2020+5: STUDI KASUS WINTER & SUMMER OLYMPICS PERIODE 2021-2025

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Berdasarkan perkembangan tersebut, implementasi Olympic Agenda 2020+5 pada periode 2021–2025 memperlihatkan pola perubahan yang bertahap (*institutional shifting*), yaitu dari fase awal implementasi kebijakan pada Tokyo 2021, fase konsolidasi pada Beijing 2022, hingga fase pencapaian paritas kuantitatif pada Paris 2024. Akan tetapi, perubahan tersebut lebih banyak terjadi pada aspek formal kelembagaan dan peningkatan representasi, sementara berbagai hambatan yang bersifat informal, seperti budaya patriarki, stereotip gender, dan ketimpangan kepemimpinan, masih menjadi faktor yang membatasi terwujudnya kesetaraan gender secara substantif. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan IOC tidak dapat diukur hanya melalui peningkatan angka partisipasi perempuan, tetapi juga melalui kemampuan institusi dalam mentransformasikan norma, praktik, dan struktur organisasi secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Olympic Agenda 2020+5 telah menjadi instrumen strategis yang memperkuat peran IOC dalam mendorong kesetaraan gender pada tingkat global. Melalui kombinasi pendekatan *integrated gender mainstreaming* dan *targeted gender mainstreaming*, IOC berhasil mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, tata kelola organisasi, penyelenggaraan Olimpiade, serta hubungan dengan berbagai aktor dalam Gerakan Olimpiade. Meskipun demikian, pencapaian tersebut belum dapat dikatakan sepenuhnya menghilangkan diskriminasi gender dalam olahraga internasional karena masih terdapat berbagai hambatan struktural, kultural, dan institusional yang mempengaruhi implementasi kebijakan di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa *gender mainstreaming* yang dilakukan IOC merupakan proses transformasi institusional yang telah menghasilkan kemajuan yang signifikan, tetapi tetap memerlukan evaluasi, penguatan komitmen, serta kolaborasi yang berkelanjutan agar tujuan kesetaraan

Bayu Ramadhani, 2026

UPAYA GENDER MAINSTREAMING OLEH INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE (IOC) DALAM MENGATASI DISKRIMINASI GENDER MELALUI KEBIJAKAN OLYMPIC AGENDA 2020+5: STUDI KASUS WINTER & SUMMER OLYMPICS PERIODE 2021-2025

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

gender dalam olahraga dapat terwujud secara lebih substantif dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, saran dirumuskan dalam saran akademis untuk pengembangan ilmu Hubungan Internasional serta saran praktis untuk pihak yang terlibat dalam isu kesetaraan gender dan olahraga.

5.2.1 Saran Akademis

Penelitian ini berfokus pada upaya International Olympic Committee (IOC) dalam menerapkan gender mainstreaming melalui kebijakan Olympic Agenda 2020+5 pada penyelenggaraan Summer Olympics dan Winter Olympics periode 2021–2025. Oleh karena itu, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya menempatkan IOC sebagai aktor utama dalam analisis, sementara implementasi kebijakan kesetaraan gender dalam Gerakan Olimpiade juga sangat dipengaruhi oleh aktor lain, seperti Federasi Olahraga Internasional (International Federations/IFs), Komite Olimpiade Nasional (National Olympic Committees/NOCs), pemerintah nasional, maupun organisasi olahraga di tingkat domestik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif mengenai implementasi kebijakan gender mainstreaming pada berbagai aktor tersebut guna melihat sejauh mana kebijakan yang dirumuskan oleh IOC diterjemahkan ke dalam praktik di tingkat nasional maupun internasional.

Selain itu, penelitian ini hanya mencakup periode implementasi Olympic Agenda 2020+5 hingga tahun 2025 sehingga berbagai kebijakan yang telah dirumuskan IOC masih berada dalam proses implementasi dan evaluasi. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan waktu penelitian dengan menganalisis perkembangan implementasi kebijakan tersebut pada

Bayu Ramadhani, 2026

UPAYA GENDER MAINSTREAMING OLEH INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE (IOC) DALAM MENGATASI DISKRIMINASI GENDER MELALUI KEBIJAKAN OLYMPIC AGENDA 2020+5: STUDI KASUS WINTER & SUMMER OLYMPICS PERIODE 2021-2025

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

penyelenggaraan Olympic Winter Games Milano Cortina 2026 maupun Olympic Games Los Angeles 2028. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberlanjutan kebijakan IOC serta efektivitas gender mainstreaming dalam jangka panjang.

Di samping itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus sehingga lebih menekankan analisis terhadap kebijakan dan perubahan institusional. Penelitian selanjutnya dapat mengombinasikan pendekatan kualitatif dengan pendekatan kuantitatif, misalnya melalui analisis statistik mengenai partisipasi atlet perempuan, representasi perempuan dalam kepemimpinan organisasi olahraga, distribusi pendanaan, maupun representasi media. Pendekatan tersebut akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dampak kebijakan gender mainstreaming yang diterapkan IOC.

5.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, International Olympic Committee (IOC) telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam tata kelola Gerakan Olimpiade melalui berbagai reformasi kelembagaan dan kebijakan. Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan pada tingkat regulasi belum sepenuhnya mampu menghilangkan berbagai bentuk diskriminasi gender yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, stereotip gender, serta perbedaan kondisi sosial dan politik di masing-masing negara. Oleh karena itu, IOC perlu terus memperkuat mekanisme implementasi dan pengawasan terhadap kebijakan Gender Equality and Inclusion Framework agar penerapannya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif di seluruh organisasi yang berada dalam Gerakan Olimpiade. Evaluasi berkala terhadap pencapaian indikator kesetaraan gender, disertai mekanisme

Bayu Ramadhani, 2026

UPAYA GENDER MAINSTREAMING OLEH INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE (IOC) DALAM MENGATASI DISKRIMINASI GENDER MELALUI KEBIJAKAN OLYMPIC AGENDA 2020+5: STUDI KASUS WINTER & SUMMER OLYMPICS PERIODE 2021-2025

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pelaporan yang transparan dan akuntabel, perlu terus dikembangkan sehingga setiap organisasi olahraga memiliki tanggung jawab yang jelas dalam memenuhi target kesetaraan gender yang telah ditetapkan.

Selain itu, Federasi Olahraga Internasional (International Federations/IFs) dan Komite Olimpiade Nasional (National Olympic Committees/NOCs) diharapkan tidak hanya mengadopsi kebijakan kesetaraan gender yang ditetapkan IOC, tetapi juga mengintegrasikannya ke dalam tata kelola organisasi, sistem rekrutmen, pengembangan atlet, serta proses pengambilan keputusan. Peningkatan jumlah perempuan dalam posisi kepemimpinan, kepelatihan, perwasitan, dan manajemen olahraga perlu menjadi prioritas agar perspektif perempuan dapat terwakili secara lebih seimbang dalam setiap kebijakan yang diambil. Di samping itu, pengembangan kapasitas melalui program pendidikan, pelatihan, mentoring, dan pengembangan karier bagi perempuan perlu diperluas agar keberhasilan peningkatan partisipasi atlet perempuan juga diikuti oleh peningkatan representasi perempuan dalam seluruh ekosistem olahraga.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa media masih menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap reproduksi stereotip gender dalam olahraga. Oleh karena itu, lembaga penyiaran, media massa, serta platform digital yang menjadi mitra penyelenggaraan Olimpiade diharapkan menerapkan IOC Portrayal Guidelines for Gender-Equal, Fair and Inclusive Representation secara lebih konsisten. Pemberitaan mengenai atlet perempuan sebaiknya lebih menekankan prestasi, kemampuan, dan pencapaian olahraga dibandingkan aspek fisik, penampilan, maupun kehidupan pribadi. Penerapan pedoman tersebut diharapkan mampu menciptakan representasi media yang lebih adil sekaligus membangun persepsi publik bahwa

Bayu Ramadhani, 2026

UPAYA GENDER MAINSTREAMING OLEH INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE (IOC) DALAM MENGATASI DISKRIMINASI GENDER MELALUI KEBIJAKAN OLYMPIC AGENDA 2020+5: STUDI KASUS WINTER & SUMMER OLYMPICS PERIODE 2021-2025

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam olahraga.

Di samping itu, pemerintah nasional dan organisasi olahraga di tingkat domestik perlu memperkuat sinergi dengan IOC dalam mengimplementasikan kebijakan kesetaraan gender melalui penyusunan regulasi nasional yang sejalan dengan prinsip-prinsip Olympic Agenda 2020+5. Harmonisasi kebijakan ini penting agar implementasi gender mainstreaming tidak berhenti pada tingkat organisasi internasional, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dalam sistem olahraga nasional. Dengan adanya kolaborasi yang berkelanjutan antara IOC, Federasi Internasional, Komite Olimpiade Nasional, pemerintah, media, dan organisasi olahraga lainnya, upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam olahraga internasional diharapkan dapat berlangsung secara lebih komprehensif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi seluruh pelaku olahraga.